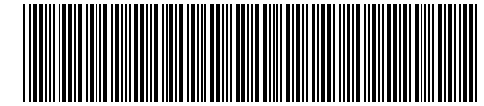




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 013.10.2.408839/2023**



DS:7990-2900-6441-2054

Revisi ke 03

Tanggal : 17 April 2023

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : (10) | Badan Pembinaan Hukum Nasional |
| 3. Provinsi | : (13) | KALIMANTAN BARAT |
| 4. Kode>Nama Satker | : (408839) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK |
| Sebesar | : Rp. | 917.551.000 (SEMBILAN RATUS TUJUH BELAS JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH SATU RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	917.551.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|-------------------|-----------|-------------|
| 1. KPPN PONTIANAK | (042) Rp. | 917.551.000 |
|-------------------|-----------|-------------|

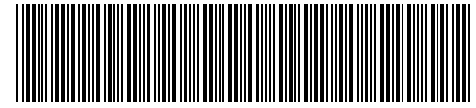
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408839/2023



DS:7990-2900-6441-2054

Satker : (408839) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	147.311.000
BB.5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp.	147.311.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	770.240.000
BF.4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp.	770.240.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408839/2023
I A. INFORMASI KINERJA**



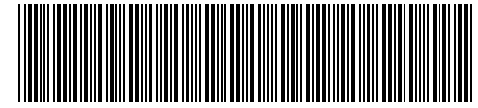
DS:7990-2900-6441-2054

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (408839) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK

Halaman : I A. 1

Program	:	013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi			147.311.000
Kegiatan	:	5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah			147.311.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	40.058.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Daerah	1,00	Rekomendasi Kebijakan	40.058.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5256.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim	107.253.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah	1,00	Lembaga	107.253.000
Program	:	013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			770.240.000
Kegiatan	:	4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah			770.240.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	7,00	Kelompok Masyarakat	170.000.000
Rincian Output	:	01 BDD.001	Fasilitasi Kelompok Desa Sadar hukum	5,00	Kelompok Masyarakat	117.330.000
Rincian Output	:	02 BDD.002	Layanan Penyuluhan Hukum	2,00	Kelompok Masyarakat	52.670.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	5,00	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	87.326.000
Rincian Output	:	01 BIC.001	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	5,00	Lembaga	87.326.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	4841.BMA	Data dan Informasi Publik	6,00	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	99.564.000
Rincian Output	:	01 BMA.001	Fasilitasi JDIHN	5,00	layanan	88.223.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408839/2023
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7990-2900-6441-2054

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (408839) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK

Halaman : I A. 2

Data dan Informasi Publik

	02	BMA.002	Layanan Perpustakaan Hukum		1.00	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi layanan		11.341.000
Klasifikasi Rincian Output	4	: 4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		45,00	Orang		360.000.000
Rincian Output		: 01	QBA.U01 Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	(PN)	45.00	Orang		360.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	: 4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat		5,00	Kelompok Masyarakat, Kegiatan		53.350.000
Rincian Output		: 01	QBC.U01 Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	(PN)	5.00	Kegiatan		53.350.000

Jakarta, 30 November 2022
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : DIPA- 013.10.2.408839/2023

I B. SUMBER DANA



DS:7990-2900-6441-2054

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
 Kode>Nama Satker : (408839) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK

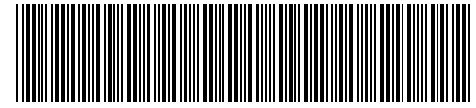
Halaman : I B. 1

				Pagu			Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2023	Rp.	917.551.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
1. Rupiah Murni	Rp.	917.551.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0	
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0	
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408839/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN**



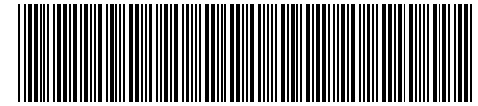
DS:7990-2900-6441-2054

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (408839) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408839	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK	-	917.551	-	-	-	917.551		
013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	147.311	-	-	-	147.311		
5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	-	147.311	-	-	-	147.311		
5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	40.058	-	-	-	40.058	13 . 51	
01	RM	-	40.058	-	-	-	40.058	042	
5256.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	107.253	-	-	-	107.253	13 . 51	
01	RM	-	107.253	-	-	-	107.253	042	
013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	770.240	-	-	-	770.240		
4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	-	770.240	-	-	-	770.240		
4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	170.000	-	-	-	170.000	13 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408839/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:7990-2900-6441-2054

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (408839) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	170.000	-	-	-	170.000	042	
4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	87.326	-	-	-	87.326	13 . 51	
01 RM		-	87.326	-	-	-	87.326	042	
4841.BMA	Data dan Informasi Publik (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	99.564	-	-	-	99.564	13 . 51	
01 RM		-	99.564	-	-	-	99.564	042	
4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	360.000	-	-	-	360.000	13 . 51	
01 RM		-	360.000	-	-	-	360.000	042	
4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	53.350	-	-	-	53.350	13 . 51	
01 RM		-	53.350	-	-	-	53.350	042	
JUMLAH		-	917.551	-	-	-	917.551		

Jakarta, 30 November 2022
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408839/2023
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:7990-2900-6441-2054

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (408839) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK

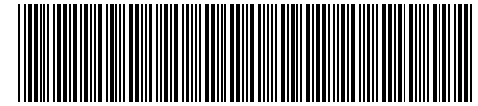
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408839	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	99.193	116.080	87.729	108.053	82.220	95.118	88.060	53.071	68.039	44.699	75.288	917.551
		BELANJA BARANG	0	99.193	116.080	87.729	108.053	82.220	95.118	88.060	53.071	68.039	44.699	75.288	917.551
	013.10.BB.5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	0	54.380	6.400	20.051	4.890	33.030	0	16.758	0	0	0	11.802	147.311
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	54.380	6.400	20.051	4.890	33.030	0	16.758	0	0	0	11.802	147.311
	013.10.BF.4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	0	44.813	109.680	67.678	103.163	49.190	95.118	71.302	53.071	68.039	44.699	63.486	770.240
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	44.813	109.680	67.678	103.163	49.190	95.118	71.302	53.071	68.039	44.699	63.486	770.240

Jakarta, 30 November 2022
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408839/2023
IV A. B L O K I R**



DS:7990-2900-6441-2054

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT
Kode dan Nama Satker : [408839] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK

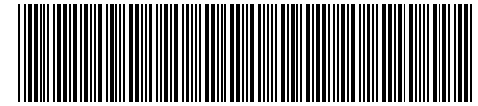
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408839/2023
IV B. C A T A T A N**



DS:7990-2900-6441-2054

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT
Kode dan Nama Satker : [408839] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001